



**RELEASE**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI**  
**KE KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT**  
**DALAM RANGKA PENGAWASAN PENANGANAN BENCANA**  
**ANGIN PUTING BELIUNG**  
**14-16 MARET 2024**

---

Komisi VIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penanganan bencana angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Bandung pada tanggal 21 Februari 2024. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dan menyalurkan bantuan sosial kepada penerima manfaat di Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI, dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI dari berbagai Fraksi.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bandung menghasilkan temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

**A. Temuan**

1. Penanganan bencana angin puting beliung di Kabupaten Bandung dilakukan dengan baik, dalam artian semua pihak yang bertanggungjawab terlibat aktif dan penetapan status tanggap bencana dilakukan dengan segera.
2. Pendataan dampak bencana angin puting beliung di Kabupaten Bandung tidak secepat sebagaimana diharapkan karena BPBD Kabupaten Bandung harus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain seperti Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat.
3. Pemerintah Kabupaten Bandung tidak memiliki anggaran untuk melakukan pemeliharaan terhadap proyek Citarum Harum yang telah selesai dibangun. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung mengharapkan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat, mengingat sangat penting proyek Citarum Harum tersebut untuk penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung secara khusus dan Provinsi Jawa Barat secara umum.

**B. Rekomendasi**

1. Pemerintah Kabupaten Bandung harus meningkatkan praktik baik dalam penanganan bencana. Dengan demikian, penanganan bencana akan semakin efektif dan efisien.

2. BPBD Kabupaten Bandung harus mempercepat proses pendataan dampak yang timbul dari bencana angin puting beliung di Kabupaten Bandung. Data tersebut akan dijadikan dasar oleh BNPB dalam menentukan jenis bantuan yang akan disalurkan kepada mereka yang terdampak, seperti bantuan untuk rumah yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
3. Pemerintah Kabupaten Bandung harus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat, antara lain dengan BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan proyek Citarum Harum yang telah selesai di bangun.

Bandung, 14 Maret 2024

Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Bandung Provinsi Jawa Barat